

**PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU: STUDI KASUS
PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI KOTA DEPOK
TAHUN 2020**

Rendi Muhammad

Ilmu Politik, FISIP UPN Veteran Jakarta

rendim@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Dalam suatu negara demokrasi, peran partisipasi masyarakat mutlak diperlukan guna melakukan kontrol atas pemerintah yang berjalan saat ini. Dalam negara demokrasi itu pula terdapat aturan bahwa sejatinya pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai konsekuensi hal tersebut, warga negara harus memilih wakil-wakilnya yang harus duduk dalam kursi pemerintahan tersebut. Lebih jauh dari pada itu, masyarakat juga harus turut andil dalam melakukan partisipasi. Dalam tulisan ini, penulis menyorot bagaimana upaya yang dilakukan Bawaslu guna menggenjot partisipasi dari masyarakat di kota Depok. Disamping itu, penulis melihat bahwa pilkada yang dilakukan 2020 silam di kota Depok dilakukan dalam bingkai pandemi, dan Kota Depok merupakan kota dengan penyebaran covid yang cukup tinggi bila dibandingkan kota-kota lain di Bodetabek (884 kasus). (Kompas.com, 2020) selain itu, kasus pertama covid juga ditemukan di Kota Depok. Oleh karena itu, penulis menganggap kota Depok merupakan konteks yang cukup menarik dalam hal bagaimana upaya Bawaslu untuk menekan partisipasi dari masyarakat. Berangkat dari itu, penulis dalam tulisan ini ingin mencoba menguraikan upaya apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Depok guna menggenjot angka partisipasi dari masyarakat. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, dimana penulis ingin mendapatkan gambaran kompleks tentang bagaimana partisipasi masyarakat berjalan di kota Depok, dengan permasalahan pandemi yang ada di kota Depok. Adapun penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam skripsi ini. Data primer penulis mewawancarai Dede Slamet Permana sebagai perwakilan dari Bawaslu kota Depok, Wildan Khalyubi selaku Koordinator KISP, dan Regita Cahyani yang merupakan masyarakat umum di kota Depok. Dalam kesimpulannya, diketahui bahwa konteks pandemi menyebabkan partisipasi politik masyarakat di kota Depok menjadi pasif. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor, yakni yang paling besar adalah masalah pandemi ini. Kendati demikian, Bawaslu memiliki upaya-upaya guna menekan angka partisipasi politik di kota Depok, salah satunya adalah SKPP (Sekolah Pengkaderan Pengawas Pemilu), sosialisasi bersama para pemangku kepentingan, sosialisasi bersama tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

1

Rendi Muhammad, 2022

Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota Depok Tahun 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id www.library.upnvj.ac.id www.repository.ac.id]

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, Pengawasan politik, Pilkada Kota Depok

**THE ROLE OF BAWASLU IN THE SUPERVISION OF ELECTIONS: A
CASE STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY
ELECTIONS IN DEPOK CITY IN 2020**

RENDI MUHAMMAD

Abstract

In a democratic country, the role of public participation is absolutely necessary in order to exercise control over the current government. In a democratic country there is also a rule that true government comes from the people, by the people and for the people. As a consequence of this, citizens must choose their representatives who must sit in the seat of government. Furthermore, the community must also take part in participating. In this paper, the authors highlight how the efforts made by Bawaslu to boost participation from the community in the city of Depok. In addition, the author sees that the 2020 regional elections in Depok were carried out within the framework of a pandemic, and Depok City is a city with a fairly high spread of covid when compared to other cities in Bodetabek (884 cases) (Kompas.com, 2020) apart from Meanwhile, the first case of Covid was also found in Depok City. Therefore, the author considers the city of Depok to be quite an interesting context in terms of how Bawaslu attempts to suppress community participation. Departing from that, the author in this paper wants to try to describe what efforts have been made by the Depok City Bawaslu to boost the participation rate from the community. This paper is a qualitative research with a case study method, where the author wants to get a complex picture of how community participation works in the city of Depok, with the problems of the pandemic in the city of Depok. The authors use primary data and secondary data in this thesis. The primary data writer interviewed Dede Slamet Permana as a representative of the Depok City Bawaslu,

Wildan Khalyubi as the KISP Coordinator, and Regita Cahyani who is a general public in the city of Depok. In conclusion, it is known that the context of the pandemic causes the political participation of the people in the city of Depok to be passive. This is based on several factors, the biggest of which is the problem of this pandemic. Nevertheless, Bawaslu has efforts to reduce the number of political participation in the city of Depok, one of which is the SKPP (Election Supervisory Cadre School), outreach with stakeholders, outreach with religious leaders, and community leaders.

Keyword: Society participation, political surveillance, Pilkada Depok